



Identifikasi Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Konawe

Asbal¹, Abuday², Anastasia Abas³, Samsia⁴, Asman⁵, Mh. Yudin⁶, Andriani Porosi⁷, Siti Aminah⁸, Rola Pola Anto^{9*}

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Program Studi (S2)Administrasi Publik, Universitas Lakidende Unaaha, Indonesia

¹Arif070710@gmail.com ²abudaykominfo2023@gmail.com , ³abasnona22@gmail.com ⁴Samsia1403@gmail.com ⁵man372277@gmail.com ⁶yuddinmuhyuddin@gmail.com, ^{7*}rola.polaanto70@email.com

Abstrak

Jumlah penduduk di Kabupaten Konawe dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga timbunan limbah domestik dan komersial dapat memberi dampak pada masalah pengelolaan dan lingkungan yang kurang sehat. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya volume sampah hari di Kabupaten Konawe khususnya wilayah perkotaan mencapai sekitar 108 ton per hari. Untuk mengatasi kondisi tersebut dibutuhkan faktor pendukung untuk terlaksananya implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik penetapan informan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukan faktor yang mendukung implementasi kebijakan meliputi adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum, komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe, komitmen dan pengalaman aparatur Dinas Lingkungan Hidup, koordinasi yang cukup baik antarinstansi, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan, serta tersedianya sarana dasar pengelolaan sampah. Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan meskipun implementasi kebijakan belum optimal dan efektif. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, belum optimalnya sosialisasi kebijakan, serta koordinasi yang masih perlu ditingkatkan. Hambatan-hambatan tersebut saling terintegrasi sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 sebagai landasan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe. Hasil riset diharapkan dapat mendorong kebijakan pengelolaan sampah yang optimal di masa akan datang.

Kata Kunci: Pendukung, Penghambat, Implementasi, Kebijakan, Sampah.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, baik, dan sehat merupakan komitmen konstitusional Pasal 28 H. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, serta mengubah paradigma sampah menjadi sumber daya yang bernilai guna. Secara teoritis, keberhasilan perwujudan lingkungan yang bersih di tingkat daerah sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan publik (UU No. 18 Tahun 2008) yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Menurut teori implementasi kebijakan dari George Edward III, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh empat variabel krusial, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, dan kejelasan struktur birokrasi. Jika salah satu dimensi ini tidak berjalan optimal, maka kesenjangan antara tujuan ideal regulasi dan realitas capaian di lapangan akan semakin melebar (Edward III, G. C., 1980).

Pertumbuhan penduduk dan dinamika aktivitas ekonomi yang pesat di tingkat daerah kerap memicu lonjakan volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaannya. Fenomena ini terlihat jelas di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkatkan timbunan limbah domestik dan komersial. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbunan sampah di Kabupaten Konawe tercatat sangat signifikan hingga menembus angka puluhan ribu ton per tahun. Bahkan, catatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa volume sampah harian di wilayah tersebut dapat mencapai sekitar 108 ton per hari, yang sebagian besar diangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) Puosu di Kecamatan Unaaha. Tingginya angka timbulan ini menuntut efektivitas pelaksanaan regulasi lokal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Meskipun instrumen hukum berupa Perda Nomor 30 Tahun 2015 telah berlaku lama, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe masih menghadapi hambatan operasional dan struktural di lapangan. Dari aspek sumber daya, armada pengangkutan dan fasilitas pemilahan sampah di tingkat kecamatan masih sangat terbatas, sehingga penumpukan sampah di ruang publik kerap tidak terhindarkan. Pada dimensi birokrasi dan komunikasi, sinergi program pengolahan sampah berbasis masyarakat seperti konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) antara Dinas Lingkungan Hidup, pihak swasta, dan komunitas lokal belum berjalan secara masif dan terintegrasi. Selain itu, disposisi pelaksana kebijakan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan penanganan sampah di Konawe masih tertuju pada paradigma lama, yaitu kumpul, angkut, dan buang langsung ke TPA Puosu. Kesenjangan (*gap*) antara mandat Perda Nomor 30 Tahun 2015 dengan kondisi riil sanitasi lingkungan inilah yang memerlukan evaluasi ilmiah secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis faktor-faktor penghambat tersebut sekaligus merumuskan strategi penataan yang aplikatif melalui judul: Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih Di Kabupaten Konawe.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah administrasi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokus pengumpulan data (observasi, wawancara dan studi dokumentasi) dipusatkan pada kawasan perkotaan yang memiliki tingkat timbulan sampah yang cukup tinggi, meliputi area pelayanan Kecamatan Unaaha dan Kecamatan Wawotobi (pusat pemerintahan dan ekonomi), tempat penampungan sementara (TPS) strategis, serta tempat pemrosesan akhir (TPA) Puosu. Penelitian ini berlangsung selama 2 (tiga) bulan, terhitung sejak dikeluarkannya izin penelitian hingga tahap penyusunan laporan akhir dan publikasi.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam pada kondisi objek yang alamiah. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, dan faktual mengenai realitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe (Sugiyono, 2020). Penelitian identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada dan diberikan oleh individu atau kelompok individu terhadap masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data yang diperoleh di lokasi penelitian (Anto, et al. 2024).

Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel sumber data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu berdasarkan pemahaman mendalam terkait objek penelitian. Adapun informan kunci (*key informants*) yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe. Adapun informan penelitian yakni para kepala bidang, pengawas lapangan dan petugas kebersihan (supir truk/petugas lapangan TPA Puosu), camat / lurah di wilayah perkotaan unaaha selaku otoritas wilayah, pelaku usaha atau pengelola pasar tradisional di Kabupaten Konawe, masyarakat / tokoh masyarakat di lokasi penelitian sasaran kebijakan (Sugiyono, 2020).

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung terhadap aktivitas penanganan sampah yang dilaksanakan oleh perangkat DLH Kabupaten Konawe. Sedangkan data sekunder yakni data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan dan dokumen resmi yang terdapat pada DLH Kabupaten Konawe. Data sekunder ini meliputi dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015, laporan tahunan timbulan sampah milik DLH, profil TPA Puosu dan anggaran penataan kebersihan lingkungan tahun 2025-2026.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*In-depth Interview*) yaitu melakukan tanya jawab langsung pada informan tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam menciptakan lingkungan yang sehat di wilayah perkotaan di Kabupaten Konawe. Selain itu, tim peneliti melakukan observasi langsung di lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan mengamati proses pengangkutan sampah dari TPS yang tersedia di wilayah Kecamatan Unaaha dan Kecamatan Wawotobi dan mengamati kondisi pembuangan dan sistem pemrosesan sampah pada Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA) di Puosu.

Pengumpulan data juga melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan literatur, regulasi, arsip laporan, serta foto visual kondisi lapangan pengelolaan sampah. Pengumpulan data penelitian kualitatif ini didukung dengan instrumen penelitian. Adapun instrumen utama adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Instrumen pendukung yang digunakan meliputi pedoman wawancara, catatan lapangan (*field notes*), alat perekam suara, dan kamera digital (Sugiyono, 2020).

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan dilakukan triangulasi untuk menjamin validitas, objektivitas, dan keabsahan data kualitatif yang dikumpulkan peneliti melalui: (1) triangulasi sumber yaitu membandingkan data hasil wawancara dari satu informan dengan informan lainnya (misalnya menyilangkan informasi dari Kepala DLH dengan laporan petugas kebersihan di lapangan). (2) triangulasi teknik yakni memverifikasi kebenaran informasi dengan mengecek data menggunakan metode yang berbeda pada sumber yang sama (misalnya mencocokkan hasil wawancara warga mengenai jadwal angkut sampah dengan hasil observasi langsung dan dokumen jadwal resmi DLH), (3) triangulasi waktu yakni peneliti melakukan pengumpulan data pada waktu atau situasi yang berbeda pada informan lingkup DLH Kabupaten Konawe (Sugiyono, 2019).

Teknik Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh di Lokasi penelitian dianalisis melalui analisis data interaktif mengacu pada model Miles Huberman, dan Saldaña (2014) dalam Nur dan Anto (2025: 141-142) yang terdiri atas tiga tahapan utama yaitu (1) reduksi data (*data reduction*) yakni proses menyeleksi, memfokuskan, merangkum, dan mengorganisasikan data mentah hasil wawancara dan observasi, (2) penyajian data (*data display*) yakni menyusun data hasil reduksi ke dalam bentuk teks naratif, matriks komparasi, atau draf bagan alir agar mempermudah peneliti dalam membaca faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe, (3) penarikan kesimpulan / verifikasi (*conclusion drawing/verification*) yakni tahap akhir untuk menyimpulkan makna dari data faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe yang telah dianalisis, mengonfirmasikannya kembali dengan teori dan dokumen pendukung, hingga diperoleh jawaban ilmiah atas rumusan masalah riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Konawe

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam identifikasi faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe khususnya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe didukung dengan ketersediaan sumber daya masih minim. Hal ini terungkap melalui kegiatan wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, diketahui bahwa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan internal organisasi pelaksana, tetapi juga berasal dari dukungan eksternal yang diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Kehadiran faktor pendukung tersebut menjadi modal penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tugas pengelolaan persampahan secara berkelanjutan meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya dan tantangan operasional (Pratama & Utomo, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen aparatur merupakan faktor pendukung yang paling menonjol dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan. Aparatur Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta tetap menjalankan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai jadwal meskipun menghadapi keterbatasan jumlah personel, armada operasional, maupun kondisi lapangan yang tidak selalu mendukung. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pelayanan persampahan sebagai bagian dari pelayanan publik. Komitmen tersebut juga diperkuat oleh pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan melalui arahan, pengawasan, dan evaluasi rutin sehingga aparatur tetap menjaga konsistensi dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya.

Faktor pendukung berikutnya adalah kejelasan pembagian tugas dan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki mekanisme kerja yang jelas melalui pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang serta didukung oleh SOP yang mengatur tata cara pelaksanaan pelayanan persampahan. Kejelasan prosedur tersebut memberikan kepastian kepada setiap aparatur mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sehingga pelaksanaan pekerjaan berlangsung secara lebih terarah dan terkoordinasi. SOP juga menjadi pedoman dalam menjaga konsistensi pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparatur. Dengan demikian, struktur birokrasi yang jelas menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Selain itu, koordinasi yang baik antarunit organisasi dan lintas sektor juga menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan

pengelolaan persampahan. Koordinasi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program sehingga setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kerja sama tersebut mempermudah penyelesaian berbagai kendala operasional yang muncul di lapangan serta mempercepat proses pengambilan keputusan ketika terjadi permasalahan pelayanan. Sinergi antarinstansi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan tidak hanya bergantung pada satu organisasi, tetapi memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Faktor pendukung lainnya adalah komunikasi yang cukup efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi, penyuluhan, serta penyampaian informasi mengenai pengelolaan persampahan kepada masyarakat. Selain itu, aparaturnya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun masukan terkait pelayanan persampahan. Komunikasi dua arah tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekaligus membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Kejelasan komunikasi juga mempermudah aparaturnya dalam menyampaikan tujuan kebijakan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe menjadi faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2015. Dukungan tersebut tercermin melalui penetapan regulasi daerah mengenai pengelolaan persampahan, pembentukan organisasi pelaksana yang memiliki kewenangan khusus di bidang kebersihan lingkungan, penyediaan anggaran operasional, serta pelaksanaan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan. Meskipun alokasi sumber daya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pelayanan, keberadaan dukungan kebijakan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan persampahan. Dengan adanya komitmen pemerintah daerah, implementasi kebijakan memiliki arah yang jelas serta memperoleh legitimasi dalam pelaksanaannya.

Di samping faktor internal organisasi, penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan turut memberikan kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan. Pada beberapa wilayah, masyarakat mulai menunjukkan kepedulian melalui kegiatan kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta memanfaatkan fasilitas persampahan yang telah disediakan pemerintah. Partisipasi tersebut membantu mengurangi beban pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat keberhasilan program pengelolaan persampahan. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe, meningkatnya kepedulian masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan implementasi kebijakan.

Apabila seluruh faktor pendukung tersebut dianalisis secara terpadu, terlihat bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai aspek yang saling mendukung. Komitmen aparaturnya memperkuat pelaksanaan pelayanan, SOP dan pembagian tugas memberikan kepastian mekanisme kerja, koordinasi lintas sektor meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, komunikasi memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat memberikan legitimasi sosial terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian, faktor-faktor pendukung tersebut membentuk suatu sistem yang saling melengkapi dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan persampahan di Kabupaten Konawe.

Komitmen aparaturnya merupakan faktor pendukung yang paling dominan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Temuan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aparaturnya tetap mampu menjaga keberlangsungan pelayanan persampahan meskipun organisasi menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Komitmen tersebut menjadi penggerak utama yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, serta penerapan SOP tetap berjalan secara efektif. Namun demikian, keberlanjutan faktor pendukung tersebut memerlukan perhatian pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparaturnya, penyediaan sumber daya yang lebih memadai, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, faktor-faktor pendukung yang telah dimiliki dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayah Kabupaten Konawe. Keberadaan faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan tujuan kebijakan belum dapat diwujudkan secara optimal meskipun pemerintah daerah telah berupaya melaksanakan berbagai program pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat menjadi penting sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan implementasi kebijakan pada masa yang akan datang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan. Jumlah petugas operasional yang dimiliki Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah pelayanan serta volume sampah yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas menjadi cukup tinggi sehingga pada waktu-waktu tertentu pelayanan pengangkutan sampah tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain keterbatasan jumlah personel, distribusi tenaga operasional juga belum sepenuhnya merata pada seluruh wilayah pelayanan sehingga beberapa kawasan memperoleh frekuensi pelayanan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Keadaan ini berdampak pada munculnya penumpukan sampah di beberapa lokasi yang memerlukan waktu lebih lama untuk ditangani.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana operasional menjadi hambatan yang cukup signifikan (Pratama dan Utomo, 2022). Armada pengangkut sampah yang tersedia belum mampu melayani seluruh wilayah Kabupaten Konawe secara optimal, terutama pada daerah yang memiliki akses transportasi yang lebih sulit atau berada pada jarak yang cukup jauh dari pusat pelayanan. Di samping itu, kondisi beberapa kendaraan operasional yang memerlukan perawatan juga memengaruhi kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan tempat penampungan sementara (TPS), peralatan pendukung operasional, serta fasilitas pengelolaan sampah turut menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan persampahan. Akibatnya, meskipun aparaturnya telah berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, keterbatasan fasilitas sering kali menyebabkan pelayanan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pengelolaan persampahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional, seperti biaya bahan bakar kendaraan, pemeliharaan armada, pengadaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan administrasi lainnya. Di sisi lain, kebutuhan pelayanan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi pelaksana harus melakukan penyesuaian prioritas penggunaan anggaran sehingga beberapa program pengembangan pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan persampahan masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Hasil studi didukung riset Lestari, et al (2024) bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah sebagai bagian dari *content of policy*. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditetapkan, membuang sampah pada lokasi yang tidak semestinya, atau belum melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan. Perilaku tersebut menyebabkan efektivitas pelayanan pemerintah menjadi berkurang karena sampah kembali menumpuk meskipun sebelumnya telah dilakukan pengangkutan. Hasil studi ini didukung penelitian Takaluhude et al (2022) bahwa aspek komunikasi dan disposisi pelaksana belum berjalan secara optimal serta masih menghadapi keterbatasan anggaran. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan belum berkembang secara optimal.

Hambatan lainnya adalah luasnya wilayah pelayanan Kabupaten Konawe yang memiliki karakteristik geografis yang beragam. Wilayah pelayanan yang luas mengharuskan Dinas Lingkungan Hidup mengatur jadwal pelayanan secara cermat agar seluruh wilayah dapat memperoleh layanan persampahan. Namun demikian, kondisi geografis tertentu, jarak antarkawasan yang cukup jauh, serta akses jalan menuju beberapa lokasi menyebabkan proses pengangkutan sampah memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi ini berdampak terhadap efisiensi penggunaan armada dan tenaga operasional karena satu kendaraan harus melayani beberapa wilayah dalam satu waktu. Akibatnya, apabila terjadi gangguan operasional, pelayanan pada wilayah lain juga ikut mengalami keterlambatan.

Selain faktor tersebut, penelitian juga menemukan bahwa koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan riset Suryadi (2025) bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi atau fragmentasi birokrasi menjadi penyebab utama terjadinya tumpang tindih dalam penanganan kebersihan pasar maupun kawasan permukiman. Walaupun koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait telah berjalan, pada praktiknya masih ditemukan kendala dalam sinkronisasi pelaksanaan program, pertukaran informasi, maupun penanganan permasalahan yang memerlukan keterlibatan beberapa pihak secara bersamaan. Perbedaan prioritas program, jadwal kegiatan masing-masing instansi, serta mekanisme koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan beberapa kegiatan memerlukan waktu lebih lama untuk direalisasikan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh organisasi pelaksana utama, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antarlembaga yang terlibat.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan persampahan masih belum optimal. Hal ini sejalan dengan riset Lestari, et al (2024) bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan masih terhambat keterbatasan teknologi pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sistem pelaporan masyarakat, pemantauan pelayanan, serta pengelolaan data operasional masih lebih banyak dilakukan melalui mekanisme konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian informasi, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, maupun evaluasi pelayanan belum dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Padahal, pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan efisiensi koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.

Apabila seluruh faktor penghambat tersebut dianalisis secara terpadu, terlihat bahwa hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 bukan hanya berasal dari satu aspek tertentu, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Keterbatasan sumber daya menyebabkan pelaksanaan SOP belum sepenuhnya optimal, sedangkan rendahnya kesadaran masyarakat meningkatkan beban pelayanan pemerintah. Luasnya wilayah pelayanan memperbesar kebutuhan sumber daya sekaligus memperumit koordinasi antarunit organisasi. Pada saat yang sama, keterbatasan anggaran membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menambah personel, armada, maupun fasilitas pelayanan. Dengan demikian, setiap hambatan saling berkaitan dan memberikan pengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Menurut teori George Edward III, implementasi kebijakan akan mengalami hambatan apabila salah satu atau beberapa variabel implementasi tidak berfungsi secara optimal. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada komunikasi, disposisi aparatur, maupun struktur birokrasi yang pada umumnya telah berjalan dengan baik, melainkan pada keterbatasan sumber daya yang kemudian berdampak terhadap pelaksanaan variabel lainnya. Keterbatasan jumlah personel, anggaran, sarana operasional, dan fasilitas pendukung menyebabkan komunikasi yang telah dibangun tidak selalu dapat diikuti dengan pelayanan yang maksimal. Demikian pula, komitmen aparatur yang tinggi belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala operasional apabila organisasi belum memiliki kapasitas sumber daya yang memadai. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat relevansi teori George Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh keterpaduan antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat merupakan hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di berbagai daerah. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan karakteristik yang lebih spesifik pada konteks Kabupaten Konawe, yaitu luasnya wilayah pelayanan menjadi faktor yang memperbesar kebutuhan sumber daya dan memperumit koordinasi antarpelaksana. Dengan demikian, tantangan implementasi di Kabupaten Konawe tidak hanya berkaitan dengan aspek organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik wilayah pelayanan.

Keterbatasan sumber daya merupakan faktor penghambat yang paling dominan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Temuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hampir seluruh hambatan yang ditemukan dalam penelitian memiliki keterkaitan dengan keterbatasan jumlah personel, anggaran, armada operasional, dan sarana pendukung. Hambatan tersebut selanjutnya memengaruhi efektivitas komunikasi, pelaksanaan SOP, koordinasi lintas sektor, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan implementasi kebijakan sebaiknya diprioritaskan pada peningkatan kapasitas sumber daya melalui penambahan tenaga operasional, modernisasi sarana dan prasarana persampahan, peningkatan alokasi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat agar tercipta sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, teori George Edward III, penelitian terdahulu, dan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, luasnya wilayah pelayanan, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Di antara berbagai faktor tersebut, keterbatasan sumber daya merupakan hambatan yang paling dominan karena memengaruhi efektivitas pelaksanaan seluruh komponen implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap hambatan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe meliputi Peraturan Daerah sebagai dasar hukum, komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe, komitmen dan pengalaman aparatur Dinas Lingkungan Hidup, koordinasi yang cukup baik antarinstansi, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan, serta tersedianya sarana dasar pengelolaan sampah. Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan meskipun masih memerlukan penguatan agar implementasi dapat berjalan lebih efektif.

Faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, belum optimalnya sosialisasi kebijakan, serta koordinasi yang masih perlu ditingkatkan. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada unsur pimpinan dan informan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Dan juga terkhusus pada Dosen Pengampu mata kuliah Bapak Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si yang selalu memberikan bimbingan selama proses penelitian berlangsung kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, S., Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti., Narita, Y. A., & Putra, M. F. P. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya*. Sukoharjo: Tahta Media Group
- Blum, H. L. (1974). *Planning for health: Development and application of social change theory*. Human Sciences Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2025). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Data timbulan sampah harian Kabupaten Konawe*. Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lestari, A., Ahmad, W., & Saputra, H. (2024). Evaluasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Kendari. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 10(1), 45-58.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman & Co.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nur, M. & Anto, R.P. (2025). *Metodologi Penelitian Bidang Ekonomi Dan Manajemen Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Malang: Penerbit Kramantara Jaya Sentosa
- Pemerintah Kabupaten Konawe. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan*. JDIH Kabupaten Konawe / BPK RI.
- Pratama, R. A., & Utomo, B. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Kabupaten Jember. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 112-126.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, M. (2025). Analisis hambatan birokrasi dalam implementasi kebijakan persampahan daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 13(1), 14-29.
- Takaluhude, C., Sondakh, J., & Londa, V. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1-12.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A. (1993). *Integrated solid waste management: Engineering principles and management issues*. McGraw-Hill.
- Zulfitra, N., Rahmad, T., & Fitriani, S. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 9(1), 89-103.